

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Perpindahan perwalian pada saat akad pernikahan pada KUA disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: wali nasabnya itu tidak ada, ghaib, mafqud, dipenjara dan juga adhal.
2. Perpindahan hak perwalian pada saat pernikahan harus melalui beberapa tahapan dan prosedur yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Agama, yang dilaksanakan oleh KUA. Berkas persyaratan yang diajukan oleh keluarga pasangan calon pengantin akan diproses dan diverifikasi oleh Petugas di KUA. Proses verifikasi dan validasi ini dilakukan beberapa kali, hingga melibatkan pihak keluarga itu sendiri. Setelah diverifikasi, rencana perkawinan kemudian diumumkan selama sepuluh hari kerja guna menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau akibat-akibat lain yang berpotensi membatalkan pernikahan nantinya.

5.2. Saran

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat Islam, terutama bagi para Kepala KUA dan stafnya. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan agar peraturan dan perundang-undangan terkait perpindahan hak perwalian dari wali nasab kepada wali hakim, seperti yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden RI, dan Peraturan Menteri Agama RI tentang Wali Hakim, dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan pernikahan, khususnya bagi pasangan calon pengantin yang beragama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya

Agama, Kementrian. n.d. "Arsip Kantor KUA Kecamatan Lubuk Begalung."

———. 1987. *Peraturan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987*.
<https://www.indolaw.de/Texte/PerMenAg 2-1987 ttg wali hakim.html>.

———. 2005. *Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2005 tentang Pemberian kuasa dan pendelegasian wewenang penandatanganan surat keputusan penyesuaian/inpassing jabatan fungsional penghulu dan angka kreditnya di lingkungan Departemen Agama RI*.
<https://itjen.kemenag.go.id/sirandang/index.php/peraturan/247-31-peraturan-menteri-agama-nomor-31-tahun-2005-tentang-pemberian-kuasa-dan-pendelegasian-wewenan>.

———. 2007. *Peraturan Menteri*.
[https://www.bing.com/ck/a?!&&p=1c5c553a4ab29bc0dbcc93e204ff43a20cb865212398371ed3eb7ad381651907JmldHM9MTczMjgzODQwMA&p=3&ver=2&hsh=4&fclid=1691d2a8-c784-6f5b-3fac-c1acc6d26e50&psq=Peraturan+Menteri+Agama+\(PMA\)+Nomor+11+Tahun+2007+Tentang+Pencatatan+Nik](https://www.bing.com/ck/a?!&&p=1c5c553a4ab29bc0dbcc93e204ff43a20cb865212398371ed3eb7ad381651907JmldHM9MTczMjgzODQwMA&p=3&ver=2&hsh=4&fclid=1691d2a8-c784-6f5b-3fac-c1acc6d26e50&psq=Peraturan+Menteri+Agama+(PMA)+Nomor+11+Tahun+2007+Tentang+Pencatatan+Nik).

Agama, Menteri. 1987. "Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987."

Al-Hallawi, Abdul Aziz. 2003. *Fatwa dan Ijtihad Umar Bin Khaththab*. Surabaya: Risalah Gusti.

Al-Hallawi, M. Abdul Aziz. 2003. *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khattab*. Surabaya: Risalah Gusti.

Al-Jazairi, Abdurrahman. 2010. *Al-Fiqh Ala Mazhib Al-Arba'ah*. Juz IV. Libanon: Musthafa Al-Baby Al-Halaby.

Al-Mubarrakfuri S.S. 2010. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Yayasan Islam Ahlus-Shuffah & Pusat studi Islam an-Nabawi.

Ali Wafa. 2018. *Hukum Perkawinan di Indonesia (Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil)*. Diedit oleh Ahmad Tholabi Kharlie. Tangerang.

Amin Muhammad Summa. 2005. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Aryandani. 2024. "KUA Hanya Mencatat Perkawinan Agama Islam, Ini Dasar Hukumnya." 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kua-hanya-mencatat-perkawinan-agama-islam-ini-dasar-hukumnya-lt65de0e526ec29/>.

Asia, Nur, Abu Yazid Adnan Quthny, dan Vita Firdausiyah. 2024. "Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Undang Undang Dasar di Indonesia (Studi Kasus di KUA Pajajaran)." *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur* 2 (1): 383–88. <https://doi.org/10.57235/motekar.v2i1.2330>.

- Atoilah, Ahmad Nabil, dan Ahmad Kamal. 2020. "Penggantian Wali Nasab oleh Wali Hakim menurut Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991." *Istinbath: Jurnal Penelitian Hukum Islam* 15 (1): 113-35. <https://doi.org/10.36667/istinbath.v15i1.276>.
- Bahasa, Tim Penyusun Kamus Pusat Penelitian dan Pengembangan. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Begalung, Kantor Kecamatan Lubuk. 2023. *Batas Wilayah*. Padang.
- BPS Kota Padang. 2023a. *Kecamatan lubuk Begalung Dalam Angka 2023*. Diedit oleh Alfid Junaidy.
- . 2023b. *Kecamatan Lubuk Begalung Dalam Angka 2023*. Padang: BPS Kota Padang.
- Departemen Agama. 1974. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974*. https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_1_Tahun_1974.
- Departemen Agama Republik Indonesia. n.d. *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: Dirjen Binbaga Islam.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang. 2022. *Junlah Penduduk Kecamatan Lubuk Begalung*.
- Faisal. 2022. "Ketentuan Batas Usia Wali Nasab Dalam Pernikahan (Analisis Pasal 18 Pma Nomor 11 Tahun 2007 dan Fiqh Al-Syāfi'iyah)." *Al-Fikrah* 11 (1): 49.
- Firman, Arifndi. 2019. *Serial Hadist Nikah 5: Wali Nikah*. Cet 1. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Hafas, Imam. 2021. "Pelaksanaan Perkawinan Dengan Menggunakan Wali Hakim (Studi di Kantor Urusan Agama Pademawu)." *of Law and Family Studies*, 3 (2).
- Haji, Tim Penyusun Dirjen Bimas Islam dan Urusan. 2000. *Pedoman Fiqh Munakahat*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji.
- Hakim, Afif Noor. 2021. "Peran KUA Terhadap Pengangkatan Wali Hakim Bagi Anak Di Luar Nikah." UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Cet 1. Bandung: Pustaka Setia.
- Hasballah Thaib. 1983. *Hukum Keluarga Dalam Syari'at Islam*. Medan: Universitas Dharmawangsa.
- Hidayat, Yayat, dan Indah Prasetya Ningrum. 2024. "Karena Wali Adhal Dalam Penetapan Pengadilan Agama Kuningan No 311 / Pdt P / 2022 / Pa . Kng (Studi Perspektif Fiqih Muqoronah) 38 : (01) 5 ٥٠٠".
- Hoerudin, Ahrum. 2004. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.

- Idris, Moh & Ramulyo. 2004. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Indonesia, Departemen Agama Republik. 1997. *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah Dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*. Jakarta: : Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf.
- Inpres. 1991. *Pasal 23 KHI (Kompilasi Hukum Islam)*. <https://cekhukum.com/pasal-23-khi-kompilasi-hukum-islam/>.
- Ja'far, Kumedi. 2021. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Arjasa Pratama.
- Jabbar, Abdul. 2022. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemindahan Perwalian Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Studi Kasus di Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya Kota Mataram)." Universitas Islam Negeri Mataram.
- Kelib, Abdullah. 1990. *Hukum Islam*. Semarang: PT Tugu Muda Indonesia.
- Kementrian Agama. 1987a. *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim*. <https://www.indolaw.de/Texte/PerMenAg 2-1987 ttg wali hakim.html>.
- . 1987b. *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Tentang Wali Hakim*. <https://www.indolaw.de/Texte/PerMenAg 2-1987 ttg wali hakim.html>.
- . 2005a. "Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005." <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt53c771c89c123/peraturan-menteri-agama-nomor-30-tahun-2005/>.
- . 2005b. *Peraturan Menti Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tetang Wali Hakim*. <https://jatim.kemenag.go.id/file/file/PMA/wjzo1395715918.pdf>.
- . 2010. *Ekspose Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Begalung Padang*.
- Khotim, Ahmad. 2023. "Perkara Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Karena Wali Adhol." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 11 (1): 96–108. <https://doi.org/https://doi.org/10.61181/at-tahdzib.v11i1.367>.
- Kompilasi Hukum Islam. n.d. "Kompilasi Hukum Islam Pasal 19." <https://cekhukum.com/pasal-19-khi-kompilasi-hukum-islam/>.
- . 2001. *Kompilasi Hukum Islam*. 2017. <http://www.helaprometheus.gr/διαγνωστικές-εξετάσεις-για-τον-καρκί/>.
- Kridho Utomo, Muhammad Qoyyum, Moh Nafik, dan Mochammad Agus Rachmatulloh. 2022. "Penetapan Perkawinan dengan Wali Hakim Akibat Wali Adhal di Pengadilan Agama Nganjuk." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 4 (2). <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v4i2.4864>.
- Kusuma, Rahmawati, dan Nabila Anita Nurdian. 2022. "Pertimbangan Hukum

- Dalam Mengabulkan Permohonan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Sumbawa Besar (Analisis tentang Penetapan Nomor 135 / Pdt . P / 2021 / PA . Sub).” *Jurnal Privat Law* 2 (2): 375. <http://eprints.unram.ac.id/28789/>.
- Marajo, Sutan Hasanudin. 2001. *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*,. Bandung: pustaka Hidayah.
- Mesta Wahyu Nita, Aini Qolbi Saputri. 2022. “Peran dan Kedudukan Wali Hakim dalam Perkawinan.” *Al Qadhi: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. <http://journal.iai-agussalimmetro.ac.id/index.php/alqadhi/article/download/401/156>.
- Misran, Murdiana, R. M. 2019. “Pandangan tengku gampong tentang wali fasik dalam pernikahan (Studi kasus di KUA Kecamatan Blangpidie, Abdy).” *Samarah : Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 3 (2): 476–89. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v3i2.4398>.
- Mudhor, A. Zuhdi. 1994a. *Memahami Hukum Perkawinan*. Cet 1. Bandung: Al Bayan.
- . 1994b. *Memahami Hukum Perkawinan*. Bandung: Al Bayan.
- . 1994c. *Memahami Hukum Perkawinan*. Bandung.
- Mughniyah, JM. 2001. *Al-Fiqh „ala al-madzahib al-khamsah*. Jakarta: PT Lentera Basritama.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 2008. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta.
- Mujib, Tholhah. 1994. *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Mujieb, Muhammad Abdul. 1999. *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Nanik Hidayati, dan Setiyowati. 2023. “Pembatalan Perkawinan Dikarenakan Penggantian Wali Nasab Oleh Wali Hakim (Studi Kasus Putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/Pa.Pkl).” *Jurnal Akta Notaris* 2 (2): 217–28. <https://doi.org/10.56444/aktanotaris.v2i2.1237>.
- Ningrum, Kurnia Sari. 2020. “Berpindahnya Wali Nasab Ke Wali Hakim dalam Pernikahan pada Tahun 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru.” *Skripsi*.
- Nurhadi. 2020. *Hukum Pernikahan Islam*. Diedit oleh Guepedia. Pekanbaru: Guepedia.
- Nurlina, dan Andi Jusran Kasim. 2022. “Ketidadaan Persetujuan Wali Nasab Untuk Mempelai Wanita Sebagai Analisis Penunjukan Wali Hakim Studi Di Pengadilan Agama Watampone Kelas I a.” *QISTHOSIA : Jurnal Syariah dan Hukum* 3 (2): 74. <https://doi.org/10.46870/jhki.v3i2.308>.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005*. 2005. <https://jatim.kemenag.go.id/file/file/PMA/wjzo1395715918.pdf>.
- Qorrie Cornea Sunarto. 2023. “WALI HAKIM DENGAN ALASAN PANDEMI PERSPEKTIF TEORI KESADARAN HUKUM (Studi di Kantor Urusan

Agama Kec. Cluring dan Kec. Tegaldlimo Banyuwangi).” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
[https://www.bing.com/ck/a?!&&p=180e7f27eddbfc715b84e4a3a4bcb98cec3bc495d9e8c1627630e026fa24c3095JmltdHM9MTczMTcxNTlwMA&p=3&ver=2&hsh=4&fclid=1691d2a8-c784-6f5b-3fac-c1acc6d26e50&psq=Qorrie+Cornea+Sunarto+\(2023\)%2C+dengan+judul+jurnal+Wali+Hakim+Alasan+P](https://www.bing.com/ck/a?!&&p=180e7f27eddbfc715b84e4a3a4bcb98cec3bc495d9e8c1627630e026fa24c3095JmltdHM9MTczMTcxNTlwMA&p=3&ver=2&hsh=4&fclid=1691d2a8-c784-6f5b-3fac-c1acc6d26e50&psq=Qorrie+Cornea+Sunarto+(2023)%2C+dengan+judul+jurnal+Wali+Hakim+Alasan+P).

Rahadian F.M. 2024. “PENGESAHAN NIKAH Mohammad Febry Rahadian Hakim Pengadilan Agama Klaten Gusti Muzainah Dosen Universitas Islam Negeri Banjarmasin , Indonesia Jalaluddin Dosen Universitas Islam Negeri Banjarmasin , Indonesia Abstrak sekedar menyangkut keabsahan , akan teta.” *ilmiah keagamaan dan kemasyarakatan* 18 (3): 1880.

Rais, Ismayanti, Muh Saleh Ridwan, dan Andi Intan Cahyani. 2022. “Peranan Wali Hakim Dalam Perkawinan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Suli Kabupaten Luwu).” *QadauNa* 4 (1).

Ramulyo, Mohd Idris. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta.

Rinwanto, Dkk. 2023. “Urgensi Wali Adhal Studi Komparasi Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Fikih.” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4 (1): 45. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i1.402>.

Rizal, Dkk. 2023. “Perbandingan Kedudukan Wali Nikah Bagi Anak di Luar Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.” *Lex Privatum* 11 (4): 4. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/47917>.

Rofiq, Ahmad. 1997. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

Safwan, Mardanas, Ishaq Taher, Gusti Asnan, dan Syafrizal. 1987. *Sejarah kota padang*. Diedit oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta.
https://books.google.co.id/books/about/Sejarah_Kota_Padang.html?id=MZuKCgAAQBAJ&redir_esc=y.

Sayyid Sabiq. 2008. *Fiqih Sunnah, jil. 3*. Jakarta: Cakrawala Publishing.

Sidek, Alang, Diani Syahfitri, dan Fatmawati. 2020. “Penunjukan Wali Nikah Bagi Anak diBawah Umur Menurut Imam Mazhab dan KHI Pada Penerapannya di Pengadilan Agama Stabat.” *International Journal of Environmental Research and Public Health* 4 (1): 2.

Sudarsono. 1991. *Hukum Perwalian Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sulaiman ibn Ash’ath, Imam Hafiz Abu Dawud. 2008. *Sunan Abu Dawud*. Diedit oleh Abdul Malik Mujahid. English Tr. Riyadh: Darussalam.

Summa, Muhammad Amin. 2005. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT. Kencana.

- . 2012a. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Diedit oleh Cet 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- . 2012b. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Diedit oleh Cet 2. Jakarta: PT. Kencana.
- Tihami dan Sohari Sahrani. 2019. *Fikih Munahakat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Cet 3. Jakarta: Raja Wali Pers.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. 1974. <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2195>.
- Wahyono, Tri, Muhammad Kurniawan, dan Budi Wibowo. 2023. "Dinamika Penyelesaian Permasalahan Wali Adhal: Studi Kasus Peran Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Sukoharjo." *Tasyri' Journal of Islamic Law* 2 (2): 375–98.
- Yunus, Muhammad. 1975. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Hidakarya Agung.
- Zainudin, Ali. 2006. *Hukum Perdata Islam Indonesia*.
- Zuhaili, Wahbah. 2002. *Al Fiqh Al-Islami*. Bandung: PT Grafinfo Group.